

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini wisata halal telah menjadi perbincangan warga dunia. Banyaknya jumlah penduduk muslim membuat jumlah wisatawan muslim semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pengembangan pariwisata halal di masa depan dianggap menjanjikan dan potensial . Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2014), diketahui bahwa potensi wisata dianggap baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata halal. Dari segi konsep, 48% responden setuju dengan konsep wisata halal. Dalam hal kebutuhan, 68% responden menekankan bahwa pariwisata halal memiliki urgensi yang tinggi dalam implementasinya. Dari segi kesesuaian, 60% responden setuju bahwa pariwisata halal sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.¹

Dengan melalui hal seperti ini, nilai yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan adalah harapan kenyamanan dan ketenangan dalam perjalanan tanpa melupakan nilai-nilai Islam. Nilai ini didukung oleh meningkatnya masyarakat muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran tinggi dalam halal suatu produk (Alim, Riansyah, Hidayah, Muslimin & Adityawarman, 2015). Itu membuat pariwisata halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengikuti permintaan pasar yang ada. Indonesia bersinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan pariwisata halal (halal tourism), misalnya Kementerian Pariwisata bekerja sama

¹ Hendry Ferdiansyah, dkk. “*Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism*”. Journal of Sustainable Tourism Research. Vol. 2, No. 1. 2020. 30-34

dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Bisnis (LSU). Bentuk konkret kerja sama adalah dengan mengembangkan pariwisata dan mempromosikan nilai-nilai budaya dan agama yang kemudian akan diuraikan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.²

Dalam pariwisata syariah, beberapa aspek utama dibutuhkan, yaitu ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, layanan buka puasa selama Ramadhan, dan pembatasan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah (Lukman Hakim, <http://travel.kompas.com>). Sedangkan fasilitas dan pelayanan wisata halal menurut GMTI (2016) adalah tempat peribadatan, makanan dan minuman berlabel halal, toilet dengan air bersih, pelayanan dan fasilitas untuk menunjang Bulan Ramadan, bebas dari minuman beralkohol dan hotel Syariah.³

Beberapa kawasan di Indonesia selama ini dikenal menjadi sentrum potensial dari pariwisata Islami seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta hingga Jawa Timur. Dari sejumlah kawasan tersebut, potensi wisata islami di provinsi Jawa Timur termasuk yang terbesar. Selain karena faktor karakter sosial masyarakatnya yang religius, Jatim juga diuntungkan dengan bonus demografis seperti terdapatnya makam-makam para *auliya*’ penyebar Islam di nusantara (5 dari 9 walisongo makamnya ada di Jatim), pulau Madura yang masyhur sebagai “Pulau Seribu Pesantren” serta kultur masyarakat muslim tradisional yang sangat kental. Berbincang tentang potensi dan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

modal sosial Madura yang kerap dijuluki sebagai “Serambi Madinah” maka kita akan langsung dihadapkan pada kesan akan kultur warganya yang Islami. Ribuan pondok pesantren yang menyebar di seantero wilayah tak ubahnya pilar penyangga dari mengakarnya karakter keislaman penduduk Madura.

Proses pengembangan pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukan sendiri tetapi pihak-pihak lain juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur pendamping, ini guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya. Menurut Charles Kaiser Jr. Dan Larry E. Helber dalam bukunya menjelaskan tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah itulah dilakukan, kita akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjung wisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah khususnya di daerah Madura sendiri.

Proses pengembangan suatu daerah tersebut dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas

berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan negara Indonesia.⁴

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai suatu sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak biasa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (interconnectedness). Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, dimana perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru.

Berbicara pengembangan potensi pariwisata disumenep banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sukses atau tidak pengembangannya, Sumenep memiliki banyak potensi pariwisatanya yang dimana meliputi wisata alam, wisata religi dan wisata sejarah. Pemerintah Kabupaten Sumenep sampai saat ini terus melakukan promosi untuk pengenalan pariwisatanya, yang dimana setiap tahunnya pun mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup efektif meski belum secara luas dikenal oleh semua masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumenep pun juga mengembangkan pariwisatanya hal ini dilakukan agar para pelancong dapat menikmati keindahan wisata di Sumenep, sehingga pemerintah kabupaten

⁴ Deni Saiful Anam. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Pantai Lembang Kabupaten Sumenep*. Role, Development, Lembang Beach Tourism Hal 2

Sumenep memperoleh sumber pendapatan daerah dari segi pariwisata yang dimana diimbangi dengan pengembangan dan promosi-promosi, dalam pengembangannya pun pemerintah daerah juga bekerjasama dengan media guna menampilkan wisata yang ada di Sumenep bertepatan hari jadi Kabupaten Sumenep sebab kegiatan ini sebagai alat promosi untuk mengenalkan pariwisata-pariwisata di Sumenep madura.

Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 27 Kecamatan, 328 Desa dan 4 Kelurahan. Terdapat 126 jumlah pulau di Kabupaten Sumenep, 48 adalah pulau berpenghuni dan 78 pulau tak berpenghuni. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang memiliki beragam destinasi dan objek pariwisata. Kondisi inilah yang menyebabkan wilayah di ujung timur Madura ini memiliki potensi yang besar sebagai salah satu kawasan pengembangan pariwisata. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penunjang untuk pembangunan ekonomi di wilayah Sumenep. Hal ini tentu juga akan berdampak positif pada meningkatnya pembangunan industri-industri baru yang berhubungan dengan pariwisata, meningkatnya lapangan-lapangan pekerjaan bagi penduduk serta mengorbitkan nama Sumenep ke kancan yang lebih luas.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah kabupaten sumenep masih dalam proses pembangunan infrastruktur dan masih melakukan kegiatan-kegiatan promosi hal ini guna menarik para wisatawan-wisatawan dalam maupun luar negri, dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kunjungan wisata meningkat secara pasti dari hitungan bulan maupun setiap tahunnya. Potensi pariwisata yang ada di

Sumenep yang cukup banyak, ini dapat dilihat dari keadaan geografinya yang dimana dikelilingi oleh banyaknya wisata di daerah tersebut dan di dukung pula keragaman wisatanya, misalnya: wisata religi, wisata pantai bahkan wisata kuliner.

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masingmasing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.⁵

Lima tahun belakangan ini, masyarakat di daerah Kabupaten Sumenep banyak melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk mencari nafkah keluarganya. Jika ditelisik lebih mendalam Sumenep memiliki keindahan alam yang mengesankan. Selain itu, Kabupaten Sumenep juga memiliki beragam wisata, yaitu: wisata religi, wisata bahari, dan wisata alam. Dari keberagaman destinasi wisata tersebut menjadi perbincangan masyarakat lokal maupun non lokal. Tidak heran jika Sumenep dikenal dengan “Kota Pariwisata” dari keempat kabupaten yang ada di Pulau Madura. peta potensi serta tekad keseriusan dalam mengembangkan potensi kepariwisataan, termasuk di dalamnya wisata islami, terpancar kuat di Kabupaten Sumenep. Selain memiliki wilayah geografis terluas dengan puluhan gugusan kepulauan, kabupaten ini ditopang oleh jumlah destinasi wisata yang

⁵ *Ibid.*

terbanyak. Hal yang terpenting, sejauh ini hanya Pemerintah Sumenep yang berikhtiar menerbitkan landasan hukum berupa regulasi kepariwisataan. Terbitnya Peraturan Bupati No.15 tahun 2018 tentang penetapan kawasan desa wisata adalah langkah kongkret dari keseriusan pengembangan industri turisme di Pulau Garam ini.⁶

Salah satu aspek yang diperlukan dalam rangka pengembangan pariwisata adalah ada tidaknya kehendak bersama (*common will*) masyarakat untuk mengembangkan pariwisata setempat. Di dalam pengembangannya peran serta masyarakat harus mendapat prioritas atau dipertimbangkan dalam segala hal yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada tahap pengawasan, sehingga pemberdayaan masyarakat lokal dalam segala aspek pembangunan pariwisata dapat diwujudkan.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. (Pasal 1 Ayat 31 Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil). Hal mendasar memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata agar pembangunan pariwisata ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan pandangan dari masyarakat, sehingga hasil dari pengembangan pariwisata ini benar-benar bisa berlanjut (*sustain*).⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Dedy Arfiyanto, SE., Mm. 2017 *Pilihan Strategi Pengembangan Wisata Gili Labak Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep* Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi. Volume VII, No.1. 53

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, Sufiyanto, mengungkapkan, dalam pengembangan sebuah lokasi wisata tidak semata-mata hanya fokus pada obyek wisata. “*Apalah artinya, mengembangkan wisata jika tidak ada dampak positif pada warga setempat, utamanya ekonomi masyarakat. Makanya, dalam pengembangan wisata Pulau Gili Labak, perlu pemberdayaan masyarakatnya dulu.*”⁸

Apa yang disampaikan kepala Disbudparpora diatas sejatinya telah dilakukan di wisata Bukit Tinggi, salah satu destinasi wisata yang menggabungkan antara keindahan alam dan buatan manusia (*Man Made*) yang terletak di Dusun Bilatompok desa Daramista Kecamatan Lenteng. Pengelola Destinasi wisata ini memiliki komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dusun tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan wisatanya. Karena itu berdasarkan hal ini, maka menarik untuk dikaji bagaimanakah pengembangan destinasi bukit Tinggi ini dalam perspektif *Hifdz Mal*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan sejumlah kajian dan argumen di atas maka masalah yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana pengembangan wisata bukit tinggi di Destinasi Wisata Bukit Tinggi?
2. Bagaimana pengembangan wisata bukit tinggi di Destinasi Wisata Bukit Tinggi dalam perspektif *Hifdz Mal*?

1.3 Tujuan Penelitian

⁸ *Ibid*

1. Mengetahui pengembangan wisata bukit tinggi di Destinasi Wisata Bukit Tinggi
2. Menjelaskan dan menganalisis pengembangan wisata bukit tinggi di Destinasi Wisata Bukit Tinggi dalam perspektif *Hifdz Mal*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang penelitian serta menjadikan referensi bagi kita dalam penyusunan pengembangan tata kelola industri pariwisata, khususnya pariwisata islami di kabupaten sumenep, baik nasional maupun daerah dan menjadi referensi bagi pemerintah pulau di Madura
2. Berkontribusi terhadap kajian akademik yang berkaitan dengan wisata islami dan basis desa wisata sebagai kebutuhan masyarakat
3. Berkontribusi terhadap terlaksananya RIP UTM dalam bidang pengembangan pariwisata di madura dan penerapan prinsip hukum Islam dalam bidang pariwisata di lapangan publik (masyarakat) serta pemerintahan
4. Membantu penulis dalam pelaksanaan dan selesainya tugas akademik (skripsi) mahasiswa.

1.5 Rencana Target Penelitian

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian Penelitian

No	Jenis	Indikator Capaian
1	Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi	<i>Accepted</i>

2	Konversi Tugas Akhir (Skripsi)	<i>In Progress</i>
---	--------------------------------	--------------------